

## **PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BIMA**

**M. Rimawan dan Fenny Aryani**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima

*E-mail:* rimawan111@gmail.com

### **ABSTRACT**

The economic performance of a region can be seen from the value of Gross Regional Domestic Revenue (GRDP) or economic growth. The economic growth of the region has an important role in creating prosperity, improving the standard of living and providing employment. Village Fund Allocation (ADD) is as a stimulus fund or stimulant fund to encourage and finance village government programs that are supported by community participation in carrying out government activities, development and community empowerment. Although ADD in the past five years has tended to increase and was very sharp in 2015-2018, Bima Regency's economic growth rate tends to fluctuate, human development index increases and poverty fluctuates. Thus the main objective of this research is to analyze the impact of ADD on economic growth, human development index and poverty in Bima Regency. The analytical method used is a quantitative research method using WarpPLS statistical tools, panel data covering 18 districts and time series data from 2015 to 2018. The analysis results show that the variable allocation of village funds has a positive effect on economic growth, human development index and poverty significantly .

**Keywords:** allocation of village funds, economic growth, human development index, poverty

**JEL Classification:** H72, H75

### **PENDAHULUAN**

Desa adalah salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan pusat. Hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, salah satu strategi pemerintah dalam hal memberi dukungan keuangan desa dan membantu agar desa menjadi mandiri adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% untuk desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam rangka mengatasi kesenjangan antarwilayah dan antara desa dan kota, pemerintah menerapkan paradigma "Membangun dari Pinggiran" yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan (Prasetyo,2014)

Dalam konteks itu maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakkan keperdesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan karena

dipandang memberi peluang untuk peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus menjadi lebih baik dan merata sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Alokasi dana desa yang diterima oleh desa sangatlah besar, dikarenakan adanya program dana desa yang merupakan kebijakan dari pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, serta mendukung kemandirian desa. Alokasi dana desa diprioritaskan pada pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat desa, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan di desa.

Penggunaan dana desa ini memperkuat anggapan bahwa dana desa belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama penyerapan tenaga kerja dari kelompok miskin dan pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dapat dimengerti jika dana desa juga belum dapat mengurangi angka kemiskinan yang mendapatkan dana desa paling besar, terutama karena hanya sebagian kecil dana yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu alokasi dana yang lebih besar untuk pembangunan fisik belum terkait langsung dengan tingkat kemiskinan, karena pembangunan fisik umumnya bersifat barang publik. memiliki kekayaan SDA melimpah, wilayah strategis, serta mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian. Kabupaten Bima mempunyai 18 kecamatan dan terdiri dari 191 desa.

Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulus atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBD desa. Data menunjukkan Kabupaten Bima pada tahun 2015 jumlah dana desa adalah sebesar Rp140, 5 miliar rupiah, tahun 2016 Rp121,8 miliar, tahun 2017 Rp155,2 Miliar, dan meningkat menjadi Rp156, 5 miliar pada tahun 2018 (BPS Kabupaten Bima, 2019).

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan UU Desa adalah bagaimana agar dana yang masuk ke desa

dapat dibagi menjadi adil kesetiap desa, mengingat tingginya keberagaman ukuran (Penduduk, Luas wilayah), Tingkat Kemiskinan di daerah dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di desa di Indonesia. Tantangan kedua adalah bagaimana anggaran desa dapat dan digunakan secara efisien dan efektif oleh desa untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bima, sebanyak 84% dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan, 6,5% untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sisanya untuk kegiatan pemerintah dan sosial kemasyarakatan. Walaupun pembangunan infrastruktur dapat saja dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui pemilihan jalan infrastruktur yang berdampak pada ekonomi, namun di lapangan banyak ditemukan di desa banyak membangun prasarana seperti gapura desa, pagar desa yang kecil dampaknya terhadap ekonomi apalagi pengurangan kemiskinan. Peran aparat sangat penting dalam pengelolaan dana desa dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bima untuk mengawal penggunaan dana desa agar efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan mengurangi kemiskinan sesuai dengan nawacita pemerintah pusat “membangun dari pedesaan”

Perlu penajaman penggunaan dana desa dengan lebih menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu dilakukan melalui prioritas belanja modal sektor tertentu terutama pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Pada hakekatnya kebijakan alokasi dana desa merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini melalui memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari

pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan pemerataan yang sebaik mungkin sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (BPS Kabupaten Bima, 2014)

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan berkurangnya kemiskinan diharapkan keseimbangan, kesenjangan antara desa dan kota bisa teratasi, dimana masyarakat desa bisa menghadapi *era society 5.0*. Berdasar uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan di Kabupaten Bima.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Teori *prinsipal-agen* menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi (Ramadona, 2016). Dalam kaitannya dengan isu penelitian ini adalah bahwa pemerintah pusat dipandang sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*, dan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara *principal agent*.

### Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa disebutkan bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari

dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

### Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ekonom klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu 1) jumlah penduduk, 2) jumlah stok barang-barang modal, 3) luas tanah dan kekayaan alam, serta 4) tingkat teknologi yang digunakan. Ujud dari adanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah ditandai dengan adanya perkembangan secara fisik produksi barang dan jasa di suatu daerah, di antaranya yaitu dengan bertambahnya hasil produksi dibidang barang, jasa serta industri, ada perkembangan infrastruktur, penggunaan dan pemanfaatan teknologi modern dalam kegiatan produksi serta peningkatan jumlah modal.

### Indeks Pembangunan Nasional

Dalam *United Nations Development Programme*, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhannya ekonominya.

### Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari. Apabila ada kondisi dimana seseorang atau sekelompok laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat maka hal itulah yang disebut dengan kemiskinan (Badrudin, 2012: 167). Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupannya secara bermartabat.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bima selama periode 2015 sampai 2018. Jenis data yang akan digunakan dalam analisis di penelitian ini adalah *cross section* dan *time series*, pada tahun 2015 - 2018 di Kabupaten Bima, yaitu menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka dan dokumen. Alat Statistik yang digunakan adalah WARP PLS (*Partial Least Square*). Data yang diperlukan adalah data Alokasi Dana Desa, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bima yang diperoleh dari *website* resmi BPS NTB, BPS Kabupaten Bima, dan Kementerian Desa Tertinggal.

Populasi penelitian ini adalah total keseluruhan Alokasi Dana Desa yang ada di Kabupaten Bima selama 2015 samapai 2018. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposif *sampling* dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan dengan tujuan akan diolah keseluruhan data yang kembali saja (Sugiyono, 2016). Variabel dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa sebagai variabel independen (X) serta Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen (Y).

**HASIL PENELITIAN**

**Pengujian Outer Model**

Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian outer model. Outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator- indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk eksogen merupakan konstruk penyebab konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lain. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. Penelitian outer model meliputi uji validitas dan reabilitas karena data yang digunakan adalah data terukur.

**Perhitungan Nilai Goodness of Fit (Inner Model)**

Model struktural atau *Inner Model* pada kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan referensi dan teori tersebut disebut *Fit* apabila didukung oleh data empiris. Perhitungan nilai *Goodness of Fit* didasarkan pada hasil SEM WarpPLS. Hasil pengujian model *Goodness of fit* disajikan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Pengujian Model Goodness of Fit**

Variabel	R-Square
Alokasi Dana Desa (DD)	-
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	1,000
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,958
Kemiskinan (KM)	0,994

Sumber: Output PLS (data olah)

*Goodness of fit inner model* pada analisis PLS menggunakan ukuran *Stone-Geisser Q-Square Test* yang berupa nilai *Q-square predictive relevance* yang dihitung berdasar nilai R<sup>2</sup> masing-masing variabel endogen, yaitu variabel belanja modal diperoleh nilai RPE<sup>2</sup> sebesar 1.000; variabel Indeks Pembangunan Manusia diperoleh nilai RIPM<sup>2</sup> sebesar 0,958; dan RKM<sup>2</sup> sebesar 0,994 dengan demikian nilai *Q-square predictive relevance* sebesar:

$$\begin{aligned}
 Q2 &= 1 - (1 - RPE^2) (1 - RIPM^2)(1 - RKM^2) \\
 &= 1 - (1 - 1,000) (1 - 0,958) (1 - 0,994) \\
 &= 1 - (0) (0,042) (0,006) \\
 &= 1 - 0,00025 \\
 &= 0,99
 \end{aligned}$$

Berdasar penghitungan tersebut, diperoleh nilai *Q-Square predictive relevance*. Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2009) jika hasil menunjukkan 0.02 (kecil), 0.15 (sedang), dan > 0.35 (besar). Dalam pengujian yang dilakukan untuk penelitian ini menunjukkan hasil sebesar 0.99 atau 99% sehingga model dikatakan memiliki nilai prediktif yang kuat atau besar karena variabel-variabel dalam model yang meliputi variabel Alokasi dana desa, mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi, indek pembangunan Manusia dan kemiskinan sebesar 99% atau 0.99 sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**Tabel 2**  
**Nilai Goodness of Fit Model**

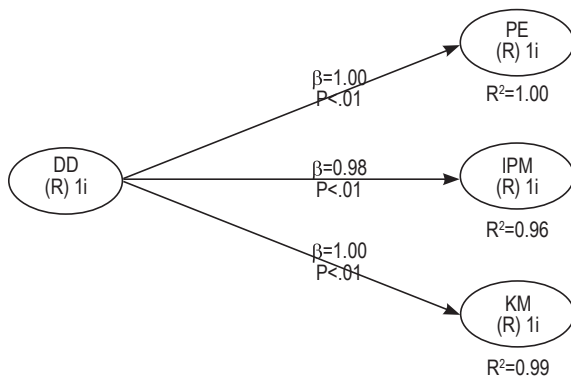
Hasil	P Value	Kriteria	Keterangan
APC = 0.992	P < 0,001	Good if P < 0.05	Diterima
ARS = 0.984	P < 0,001	Good if P < 0.05	Diterima
AVIF = 1.056		P < 5	Diterima

Sumber: Hasil output PLS

Interpretasi indikator model fit dalam penelitian ini memenuhi kriteria nilai *Goodness of Fit Model* sehingga model penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan beberapa dan menguji hipotesis.

**Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable eksogen terhadap variable endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa sedangkan variabel endogen adalah pertumbuhan ekonomi, indeks pembanguana manusia dan kemiskinan. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai beta ( $\beta$ ) antar variabel dan *p-value*. hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan warp pls 3.0 ditunjukan sebagai berikut



**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bima**

Berdasar hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari

nilai koefisian  $\beta$  sebesar -1,00 (minus) dengan *p-value* <0,01 yang lebih kecil dari alfa ( $\alpha$ ) 0,05. Oleh karena itu, hipotesis alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di Kabupaten Bima sudah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Afrilianto (2017) yang mengatakan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bima**

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisian  $\beta$  sebesar 0.98 (positif) dengan *p-value* <0,01 yang lebih kecil dari alfa ( $\alpha$ ) 0,05. Oleh karena itu, hipotesis alokasi dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di Kabupaten Bima sudah mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

**Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bima**

Berdasar hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisian  $\beta$  sebesar -1,00 (negatif) dengan *p-value* <0,01 yang lebih kecil dari alfa ( $\alpha$ ) 0,05. Oleh karena itu, hipotesis alokasi dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa di Kabupaten Bima sudah mampu mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bima, penelitian ini bertolak belakang denagna penelitian (Dianti *et. al* 2018) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa tidak dapat mengurangi kemiskinan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa 1) Alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa belum maksimal; 2) Alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan semakin baik pengelolaan alokasi dana desa maka indek pembangunan manusia semakin tinggi dan kesejahteraan masyarakat desa semakin bagus. Alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa belum mampu mengurangi kemiskinan.

### Saran

Aparat desa diharapkan lebih memperhatikan pengalokasian dana desa agar tepat sasaran dan memperbanyak program pemberdayaan masyarakat.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Website [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

Website [www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id).

Website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrilianto. 2017. *Analisis dampak alokasi desa terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor*. Jurnal IPB.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dianti. 2018. *Pengaruh alokasi dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi, 18(4): 1, 2018.
- I. Ghozali dan H. Latan. 2015. *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0, Edisi 2*. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011*.